



Disnakerind
Tanah Laut

LAPORAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPUPD - SKPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA**
 2. **URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN**
-



JL. A. SYAIRANI KOMP. PERKANTORAN
Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan 70815
TELP. (0512) 21165



KATA PENGANTAR

Dengan memenjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyelesaikan LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPUPD - SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan dalam prinsip Otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian telah diselesaikan beberapa cacatan penting yaitu : pelatihan dan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, harmonisasi hubungan industrial, peningkatan kualitas IKM.

Seiring dengan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2019 belum ditemukan permasalahan yang berarti namun Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut beserta segenap jajarannya berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun kritik dan saran membangun senantiasa diharapkan sebagai barometer perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian LPPUPD - SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019 disusun, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita semua..... Aamiin.

Pelaihari, 27 Januari 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG.....	1
	B. GAMBARAN UMUM SKPD.....	1
	a) STRUKTUR ORGANISASI	1
	b) KEPEGAWAIAN.....	3
	c) KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN.....	4
	d) DATA STATISTIK.....	7
	e) KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	28
BAB II	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	29
	1. URUSAN WAJIB (BIDANG KETENAGAKERJAAN).....	29
	a. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	29
	b. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
	c. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.....	30
	d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	30
	2. URUSAN PILIHAN (BIDANG PERINDUSTRIAN).....	31
	a. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	31
	b. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
	c. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.....	32
	d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	33
	3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (KESEKRETARIATAN).....	33
	a. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	33
	b. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
	c. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	35
	d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	37
	4. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.....	37
BAB III	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	38
	a. DASAR HUKUM	38
	b. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN/DANA DEKONSENTRASI	39
	c. PROGRAM, KEGIATAN	39
	d. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN.....	42
	e. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN	42
	f. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	43
	g. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	45
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	47
	1. KERJASAMA DAERAH	47
	a. MITRA YANG DIAJAK KERJASAMA	47
	b. DASAR HUKUM.....	47
	c. BIDANG KERJASAMA	47
	d. NAMA KEGIATAN	47
	e. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....	47
	f. JANGKA WAKTU KERJASAMA.....	48
	g. HASIL (OUTPUT) DARI KERJASAMA.....	48
	h. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	49
	2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.....	49
	3. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS	49

	a.	JENIS KAWASAN KHUSUS	49
	b.	STATUS KEPEMILIKAN KAWASAN KHUSUS.....	49
	c.	SUMBER ANGGARAN	49
	d.	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	49
	4.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	49
	5.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49
BAB V		PENUTUP	50
	1.	KESIMPULAN.....	50
	2.	KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN.....	51
	a.	PRESTASI YANG DICAPAI OLEH DINAS TENAGA KERJA & PERINDUSTRIAN.....	51
	b.	PRESTASI YANG DICAPAI OLEH LEMBAGA/ MASYARAKAT BINAAN DISNAKERIND.....	51

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.	Tabel 1.1 (Gambaran Sarana Dan Prasarana Tahun 2019)	4
2.	Tabel 1.2 (Rekapitulasi Data Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas)	9
3.	Tabel 1.3 (Pelaksana Pelatihan dan Produktivitas oleh Pemerintah)	10
4.	Tabel 1.4 (Pelaksana Pelatihan dan Produktivitas oleh LPK Swasta)	14
5.	Tabel 1.5 (Pelaksana Pelatihan dan Produktivitas oleh BLK Komunitas)	13
6.	Tabel 1.6 (Rekapitulasi Data Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)	13
7.	Tabel 1.7 (Rekapitulasi Data Perluasan Kesempatan Kerja)	14
8.	Tabel 1.8 (Pencatatan PKWT)	16
9.	Tabel 1.9 (Pengesahan Peraturan Perusahaan)	17
10.	Tabel 1.10 (Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama)	17
11.	Tabel 1.11 (Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang)	18
12.	Tabel 1.12 (Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan)	18
13.	Tabel 1.13 (Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh)	19
14.	Tabel 1.14 (Daftar Permohonan Evaluasi Kinerja Perush Perpanj. Izin Operasional))	19
15.	Tabel 1.15 (Data Statistik Persyaratan Kerja)	20
16.	Tabel 1.16 (Indeks Kepesertaan Jamsostek Untuk Kepesertaan Formal)	22
17.	Tabel 1.17 (Data LKS Bipartit)	23
18.	Tabel 1.18 (Data Serikat Pekerja/ Serikat Buruh)	23
19.	Tabel 1.19 (Data PHK)	24
20.	Tabel 1.20 (Data Tahapan Kasus Perselisihan HI)	24
22.	Tabel 1.21 (Data Peserta Pelatihan Seksi PSDI)	25
23.	Tabel 1.22 (Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri Yang Diterbitkan)	25
24.	Tabel 1.23 (Data Statistik Jumlah IKM)	25
25.	Tabel 1.24 (Progress Pembangunan Gedung Sentra IKM)	26
26.	Tabel 1.25 (Data Statistik Jumlah Pameran Yang Diikuti)	26
27.	Tabel 1.26 (Data Statistik Pelatihan Seksi PI)	26
28.	Tabel 1.27 (Rekapitulasi Pelatihan Berbasis Kompetensi)	28
29.	Tabel 2.1 (Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib Ketenagakerjaan)	31
30.	Tabel 2.2 (Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Perindustrian)	33
31.	Tabel 2.3 (Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesekretariatan)	37

32.	Tabel 3.1 (Rencana Pelatihan Berbasis Kompetensi)	41
33.	Tabel 3.2 (Rencana Anggaran Program Dekonsentrasi)	42
34.	Tabel 3.3 (Rincian Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi)	42
35.	Tabel 3.4 (Realisasi Pelatihan Berbasis Kompetensi)	44
36.	Tabel 3.5 (Realisasi Anggaran Program Dekonsentrasi)	45
37.	Tabel 3.6 (Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi)	45
38.	Tabel 5.1 (Prestasi/ Penghargaan Yanaih Disnakerind)	51
39.	Tabel 5.2 (Prestasi/ Masyarakat Binaan Disnakerind)	51
40.	Tabel 5.3 (Prestrasi/ Penghargaan yang diraih Lembaga)	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

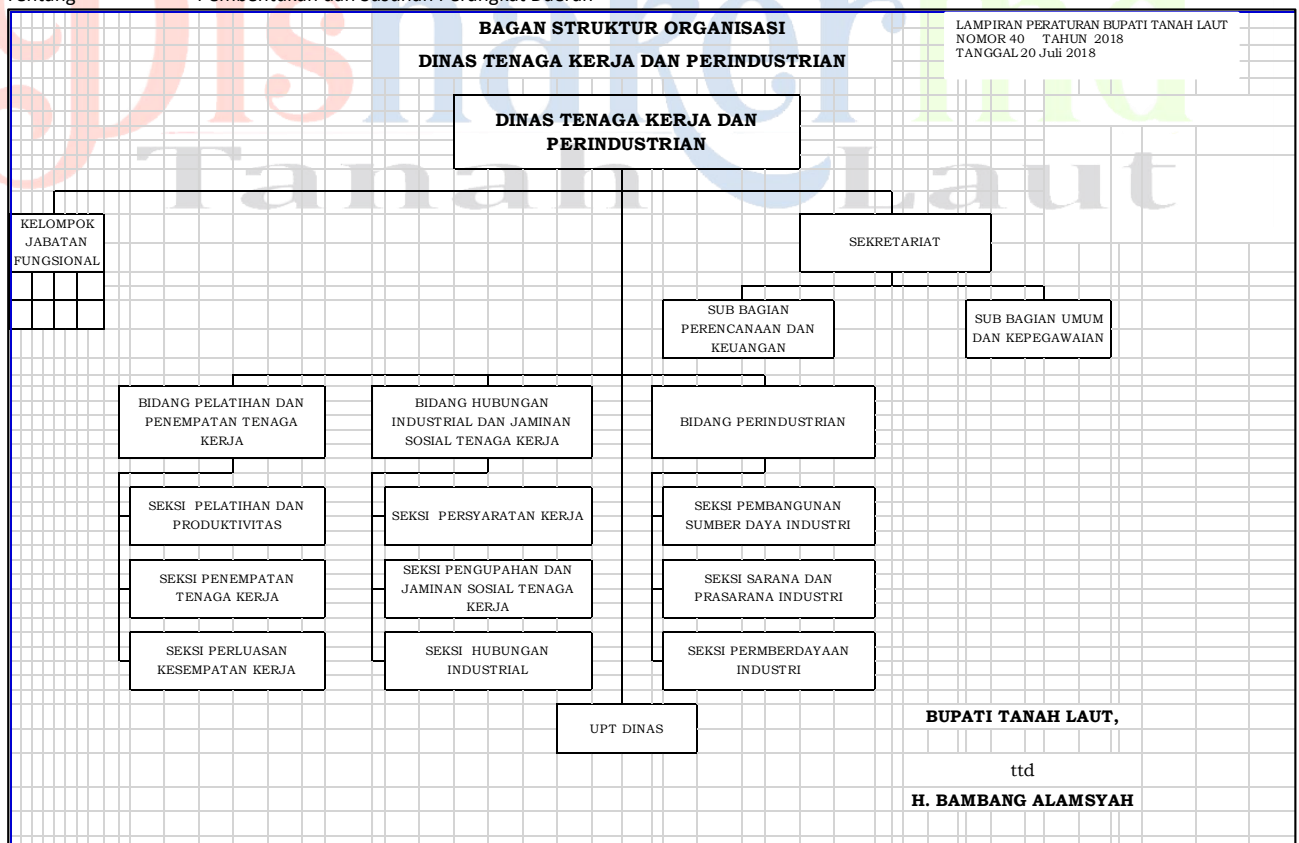
B. Gambaran Umum SKPD.

a) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
- 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
- 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perda Nomor : 6 Tahun 2016
 Tanggal : 18 Nopember 2016
 Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



b.) Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, sampai Bulan Desember 2019 adalah 44 Orang yang terdiri dari :

- Berdasarkan Pendidikan :

S2	=	7	orang
S1	=	22	orang
D3	=	4	orang
SLTA	=	11	orang

b) Berdasarkan Golongan :

IV/b	=	3	orang
IV/a	=	4	orang
III/d	=	10	orang
III/c	=	7	orang
III/b	=	8	orang
III/a	=	6	orang
II/c	=	5	orang
I/c	=	1	orang

- Menurut Jabatan Struktural / Fungsional adalah :

Kepala Dinas (Eselon II b)	=	1	orang
Sekretaris (Eselon III a)	=	1	orang
Kepala Bidang (Eselon III b)	=	3	orang
Kasubbag / Kepala Seksi (Eselon IV a)	=	12	orang
Kasubbag TU. BLK (Eselon IV b)	=	1	orang
Jabatan Fungsional / Instruktur	=	11	orang
Non jabatan / staf	=	15	orang

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1 Gambaran Sarana dan Prasarana Tahun 2019

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Kantor	2265 m ²	v		
2.	Tanah BLK	20.000 m ²	v		
3.	Gedung Kantor	1 buah	v		
4.	Gedung BLK	1 buah	v		
5.	Kendaraan Roda 2	10	7	2	1
6.	Kendaraan Roda 4	4	3		1
7.	Global Positioning system (GPS)	1	v		
8.	Air Conditioning Unit	2		v	
9.	Mesin ketik manual portable	-			
10.	Filling Besi/metal	16	9	2	5
11.	Lemari Kaca	-	-	-	
12.	Lemari Kayu	-	-	-	
13.	Papan Pengumuman	2	v		
14.	Genset	2	v		
15.	Bangku Tunggu	2	v		
16.	Meja Rapat	40	v		
17.	Kursi Tamu	7	7		
18.	Meja Komputer	6	v		
19.	Kursi kerja	36	25	11	
20.	Banner	-			
21.	Lemari Es	5	v		
22.	AC Split	33	26	4	3
23.	Kipas Angin	6	6		
24.	P.C unit/ Komputer PC	33	20	3	10
25.	Laptop	23	23		

26.	Note Book	1	1		
27.	Batteray Charger Notebook	1	1		
28.	CPU	1	1		
29.	Monitor	1	1		
30.	Printer	23	22	1	
31.	UPS	1			1
32.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	v		
33.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	3	2	
34.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	9	1	
35.	Meja Kerja	31	29	2	
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	v		
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3		2
38.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	v		
39.	Camera + Attachment	1	v		
40.	Proyektor + Attachment	3	3		
41.	Handycam	1	v		
42.	Televisi	2	v		
43.	Camera Electronic	4	3	1	
44.	wireless Portable (Sound System)	1	v		
45.	Mesin Gerinda	10	v		
46.	Mesin Kompresor	1	v		
47.	Mesin Gerinda Tangan	1	-		1
48.	Mesin Bor Tangan	2	v		
49.	Perkakas Bengkel Lain-Lain	11	11		
50.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	2	1	1	
51.	Mesin Gergaji	3	v		
52.	Mesin Ketam	1	v		
53.	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	7	6	1	
54.	Peralatan Las Lain-lain	14	13	1	
55.	Receiver	1	v		
56.	Tang	1	v		

57.	Alat Processing Lain-lain	2	v		
58.	Alat Pengemas Makanan	2	v		
59.	Mesin Kontrol/Jaga	8	v		
60.	Brankas	1			V
61.	Meja Panjang	2	v		
62.	Meja Biro	2	v		
64.	Oven Listrik	2	v		
65.	Tabung Gas	2	v		
66.	Dispenser	1	v		
67.	Alat Penggiling Daging	2	v		
68.	Mesin Jahit	37	36	1	
69	Tangga Alumunium	1	v		V
70	Tong Sampah	2	v		
71	Tabung Pemadam	1	v		
72	Scanner	1	v		
73	Hardisk Eksternal	7	7		
74	Pressure Gauge	2	v		2
75	Water Jet Spray	1	v		
76	Mixer	2	2		
77	Mesin Jahit Pasangan Kancing	2	v		
78	Mesin Jahit 3 Pasha	1	v		
79	Lead Detector	2	v		
80	Meja PNS Non Struktural	2	v		
81	Mesin Bor	4	v		
83	Mesin Proses Lain (Pengolah Batu Akik)	2	v		
	Modem				
84	Mixer	1	v		
85	Papan Tulis	1	v		
86	Software	5	v		
87	PC Server	4	v		
88	Food Prosesor	1	v		

89	Oven Gas	2	v		
90	Sealer	1	v		
91	Pancai Presto	6	v		
92	Pisau Set	1	v		
93	Frezer Kulkas	8	v		
94	Meja Konter	2	v		
95	Bangku Tunggu	1	v		
96	Lemari 3 Pintu	4	v		
97	Rak Kayu	1	v		
98	Gantungan Kain	5	v		
99	Meja Rapat	5	v		
100	Kursi Rapat	1	v		
101	Cermin	25	v		
102	Lemari Etalase	3	v		
103	Manekin Fullbody	3	v		
104	Manekin Halfbody	5	v		
105		5	v		

d) Data Statistik

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan ini melaksanakan tentang ketenagakerjaan dan perindustrian, adapun Data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas (Latas)

Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan tenaga kerja meliputi standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas.

Seksi Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI DATA PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT KEADAAN s/d DESEMBER 2019										
NO	LEMBAGA PENYELENGGARA	JENIS	KEJURUAN	JUMLAH PESERTA (Org)			JUMLAH KELULUSAN		SUMBER DANA	KETERANGAN
				L	P	JUMLAH	PELATIHAN / PEMAGANGAN	UJI KOMPETENS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)										
1	BLK PELAIHARI	PBK Institutional Non Boarding	Juru Las SMAW 3G	48		48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pembuatan Pupuk Organik	26	6	32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Service Sepeda Motor Konvensional	48		48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Service Sepeda Motor Injeksi	48		48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pemasangan Istalasi Otomasi Listrik Industri	30	2	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Instalasi Penerangan	29	3	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	14	2	16	16		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Tukang Pasang Pondasi Batu Alam	16		16	16		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Mengerjakan Finishing Teknik Semprot	32		32	32	16	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Drafter 2D	26	6	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Furniture Alumunium	32		32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Bangunan Batu dan Beton	16		16	16		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Operator Menjahit Pakaian Dasar	4	44	48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi	PBK Institutional Boarding	Desain Grafis			8	8			Selesai Dialaksanakan
			Elektronika			8	8			Selesai Dialaksanakan
			TIK			8	8			Selesai Dialaksanakan
3	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK)	PBK Institutional Boarding	Garmen			8	8			Selesai Dialaksanakan
			Sekretaris			8	8			Selesai Dialaksanakan
4	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung	PBK Institutional Boarding	Manufaktur			8	8			Selesai Dialaksanakan
5	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan	PBK Institutional Boarding	Pariwisata			10				Sedang Dilaksanakan
			Bangunan			1				Sedang Dilaksanakan
6	BLK KOMUNITAS PONPES UBUDIAH BATI-BATI	PBK Institutional Non Boarding	Operator Basic Office	36	44	80	80			Tahap VI sedang berjalan
7	LPK COMMUNICATIVE CENT	PBK Non Boarding	Komputer			0				
			Bahasa Inggris			0				
8	LPK SWARNADWIPIA	PBK Non Boarding	Komputer	8	2	10	10			
9	LPK BINA NUSANTARA	PBK Non Boarding	Komputer			80	80			
10	LPK INSAN MANDIRI	PBK Non Boarding	Komputer	20	19	39	35			

11	LPK SHAFIRA COMPUTER COURSE	PBK Non Boarding	Komputer	12	13	25	6			
12	LPK AN-NUR	PBK Non Boarding	Komputer			1	1			
13	LPK BORNEO INSAN KREATIF	PBK Non Boarding	Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan			0				
		PBK Mobile Training Unit/ Non Institutional	Pelatihan Kerja Industri Pengolahan Klasifikasi Industri Kecil Menengah (IKM)			20	20			Dilaksanakan Di Desa Kayu Abang Kec. Tambang Ulang
14	LPK SALSABILA	PBK Non Boarding	Mengemudi	20	36	56	46			
15	LPK NINDYA PUTRI	PBK Non Boarding	Tata Kecantikan		16	16	16		APBN	Banprog Kemnaker
16	LPK BEC	PBK Non Boarding	Komputer			5	5			
			Bahasa Inggris			15	15			
17	LPK REYS AESTHETIC	PBK Non Boarding	Tata Kecantikan Kulit		20	20	20			
18	LPK STKOM SAPTA COMPUTER	PBK Non Boarding	Komputer			50	50			
19	LPK MIMI	PBK Non Boarding	Tata Rias Penganten		16	16	16		APBN	Banprog Kemnaker
			Tata Busana			0				
			Tata Rias Salon Kecantikan			0				
JUMLAH				809	693	1756	1712	912		
B. PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI OJT (ON THE JOB TRAINING) / PEMAGANGAN										
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALIMANTAN SELATAN	Pemagangan Dalam Negeri	Teknik	10		10			APBN	PT. SINAR NUSANTARA INDUSTRIES
			Produksi	7	3	10			APBN	
			Produksi	7	3	10				
			Produksi	10		10			APBN	PT. PANEN EMBUN KEMAKMURAN
2	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT	Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Elektrik	8	2	10			APBD	PT. SNI
			Akuntansi		2	2				
			Teknik Komputer dan Jaringan	2		2				
			Tata Niaga	1		1			APBD	PT. INDONESIAN MINERAL COAL MINING
			Multi Media	1		1				
			Administrasi Perkantoran		1	1				
		Pemagangan Luar Negeri	-			0				
JUMLAH				46	11	57	0	0		
TOTAL				855	704	1813	1712	912		

Tabel 1.2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu Pelatihan 500 orang siap kerja per tahun telah dilampaui.

Terkait Pelayanan pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

A. PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA OLEH PEMERINTAH				
NO.	NAMA INSTANSI	JENIS PELAYANAN PELATIHAN		KETERANGAN
		JENIS PELATIHAN	KEJURUAN	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pelatihan Tenaga Kerja Bongkar Muat	-	1 Kegiatan
		Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	-	2 Paket
		Pelatihan Manajemen Bagi Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	-	1 Kegiatan
		Pelatihan Bagi Instruktur, Tenaga Latih Lembaga Pelatihan Kerja	-	4 Kegiatan
2	UPT. BALAI LATIHAN KERJA	Pelatihan Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit/ Non Institutional	1. Juru Las SMAW 3G 2. Pembuatan Pupuk Organik 3. Service Sepeda Motor Konvensional 4. Service Sepeda Motor Injeksi 5. Instalasi Penerangan 6. Furniture Aluminium 7. Bangunan Batu dan Beton 8. Operator Menjahit Pakaian Dasar 9. Menjahit Pakaian Sesuai Style 10. Pengolahan Hasil Perikanan 11. Perawatan AC Split 12. Operator Basic Office 13. Pembuatan Roti 14. Tata Rias Pengantin 15. Tata Rias Kecantikan Rambut	2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket
		JUMLAH		26 Paket
		Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Boarding	1. Juru Las SMAW 3G 2. Pembuatan Pupuk Organik 3. Service Sepeda Motor Konvensional 4. Service Sepeda Motor Injeksi 5. Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri 6. Instalasi Penerangan 7. Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan 8. Tukang Pasang Pondasi Batu Alam 9. Mengerjakan Finishing Teknik Semprot 10. Drafter 2D 11. Furniture Aluminium 12. Bangunan Batu dan Beton	3 Paket 2 Paket 3 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket
			13. Operator menjahit Pakaian Dasar 14. Menjahit Pakaian Sesuai Style 15. Pengolahan Hasil Pertanian 16. Pengolahan Hasil Perikanan 17. Perawatan AC Split 18. Operator Basic Office 19. Practical Office Advanced 20. Desain Grafis 21. Video Editing 22. Pembuatan Roti dan Kue 23. Tata Rias Pengantin 24. Tata Rias Kecantikan Rambut	3 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket 2 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 2 Paket
		JUMLAH		53 Paket

Tabel 1.3

B. PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA OLEH LPK SWASTA							
NO	NAMA LEMBAGA	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)			PROGRAM / KEJURUAN	NAMA PIMPINAN/NO.HP	ALAMAT
		PEMBERI IZIN	NOMOR IZIN	TANGGAL IZIN			
1	LPK ETTY SALON	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 002/IO-LPK/DTKTS-PPTK/V/2013	Diterbitkan tanggal 7 Mei 2013	Tata Rias Pengantin, Rambut dan Wajah	SUHENDARTI	Jl. A. Yani RT. 045 RW. 001 Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
2	LPK MEDIA KOMPUTER	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 004/IO-LPK/DTKTS-PPTK/V/2013	Diterbitkan tanggal 8 Mei 2013	Komputer, Teknisi dan Pengetikan	ARBAINAH	Jl. A. Yani KM. 5 RT. 18 RW. 03 Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
3	LPK AMDA MULTI MANDIRI	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 006/IO-LPK/DTKTS-PPTK/XI/2013	Diterbitkan tanggal 18 Nopember 2013	Kursus Komputer, Tenisi Komputer, Bahasa Inggris, Aneka Kuliner/ Kue, Dekorasi Kue, Keperawatan (Orang Tua dan Anak)	HILMAN SA'ADUDIN, SH	Jl. Pintu Air No. 28 RT. 24 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
4	LPK MY SALON	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 004/IO-LPK/DTKTS-PPTK/XI/2014	Diterbitkan tanggal Nopember 2014	Tata Rias Pengantin, Rambut dan Busana	NAZARIAH	Jl. A. Yani No. 4 RT. 06 RW. 02 Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut
5	LKP AR-RIZQI	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 004/IO-LPK/DTKTS-PPTK/XI/2014	Diterbitkan tanggal 9 Nopember 2015	Kursus Komputer	JURIANSYAH, S. Pd	Jl. Raya Tabanio RT. 17 Desa Tabanio Kec. Takisung Kab. Tanah Laut
6	LPK CANDRI EDUCATION	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 005/IO-LPK/DTKTS-PPTK/VIII/2016	Diterbitkan tanggal 8 Agustus 2016 dan masa berlaku s/d 7 Agustus 2017	Kursus Tata Boga	TRI SURADIANINGSIH	Jl. Gembira No. 29B Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
7	LKP Q-RUN COMP	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 007/IO-LPK/DTKTS-PPTK/VIII/2016	Diterbitkan tanggal 31 Agustus 2016	Kursus Komputer	RATMANTO	Komp. Pasar Gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut
8	LPK COMMUNICATIVE CENTER	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 003/IO-LPK/DTKTS-PPTK/VII/2014	Diterbitkan tanggal 10 Juli 2014	Kursus Komputer dan Bahasa Inggris	H. ERMANTO, S. Pd, M. Pd HP. 0812 5171 087	Jl. Al Manar No. 18 RT. 22 RW. 06 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/033/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 31 Mei 2017			
9	LPK BINA NUSANTARA	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 005/IO-	Diterbitkan tanggal 25 Mei 2016 dan masa berlaku s/d 25 Mei	Kursus Komputer	SUGIARTO, A. Md HP. 0813 4839 5727	Jl. Pusara RT. 03 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/039/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 4 Juli 2017			
10	LPK SHAFIRA COMPUTER COURSE	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 002/IO-LPK/DTKTS-PPTK/VI/2016	Diterbitkan tanggal 1 Juni 2016 dan masa berlaku s/d 1 Juni 2017	Kursus Komputer	SUDOMO HP. 0852 4680 5962	Jl. Antesa RT. 5B RW. 1 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/048/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 26 September 2017			

B. PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA OLEH LPK SWASTA							
NO	NAMA LEMBAGA	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)			PROGRAM / KEJURUAN	NAMA PIMPINAN/NO.HP	ALAMAT
		PEMBERI IZIN	NOMOR IZIN	TANGGAL IZIN			
11	LPK SALSABILA	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 001/IO-LPK/DTKTS-PPTK/IV/2016	Diterbitkan tanggal 15 April 2016 dan masa berlaku s/d 15 April 2017	Kursus Mengemudi Kendaraan Roda 4 (Empat)/ Mobil	AULIA RIZKI HP. 0813 4772 6015 0852 4711 1593	Jl. KH. Dewantara RT. 07 RW. 02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/048/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 8 Februari 2018			
12	LPK NINDYA PUTRI	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 006/IO-	Diterbitkan tanggal 3 Oktober 2016 dan masa berlaku s/d 2	Kursus Tata Rias/ Kecantikan	UMI KALSUM, A. Md HP. 0813 5192 3745	Komp. Taman Asri Jl. Anggrek Blok B-5 RT. 016 RW. 005 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/033/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 8 Februari 2018			
13	LPK BEC (Borneo English Course)	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 003/IO-LPK/DTKTS-PPTK/VI/2016	Diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 dan masa berlaku s/d 20 Juni 2017	Kursus Bahasa Inggris	SUPRIYANTO, M. Pd HP. 0821 4177 9176	Jl. Griya Persada Asri 38 RT. 11 RW. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Tanah Laut Nomor : 004/IO-LPK/DTKTS-PPTK/VII/2016	Diterbitkan tanggal 12 Juli 2016 dan masa berlaku s/d 11 Juli 2017	Kursus Komputer		
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/034/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 28 Februari 2018	1. Kursus Komputer 2. Kursus Bahasa Inggris		
14	LPK SWARNADWIPIA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/035/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 31 Mei 2017	Kursus Komputer	HAERUDIN HP. 0812 5186 2773	Jl. Niaga Gg. Baru RT. 13 RW. 04 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
15	LLS MENARA QUANTUM	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/037/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 12 Juni 2017	Softskill : Motivasi Kewirausahaan, Outbound dan Pengelolaan Manajemen UMKM	JAKI AZMI, SE HP. 0852 4951 7226	Komp. Kijang Mas Jl. Kutilang 2 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
16	LKP INSAN MANDIRI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/045/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 30 Agustus 2017	Komputer dan Bimbingan Belajar	M. ARIFIN, S. Pd. I HP. 0852 4932 8606	Desa Kintapura RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kintap
17	LPK AN-NUR	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/031/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 16 Januari 2018	Komputer	YULIANOR HP. 0852 4815 7706	Jl. A. Yani RT. 05 RT. 02 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap
18	LPK BORNEO INSAN KREATIF	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/030/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 16 Januari 2018	1. Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan 2. Pelatihan Kerja Industri Pengolahan Klasifikasi Industri Kecil Menengah (IKM)	SIRAJUDIN HP. 0853 4948 3857	Komp. Gagas Permai Nomor 100 Jl. Putar RT. 023 RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
19	LPK REYS AESTHETIC	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/036/DTKP/PPTK-PK/2017	Diterbitkan tanggal 7 Maret 2018	Tata Kecantikan Kulit	RAHMAWATI, S. Kep, Ns HP. 0823 5389 2012	Jl. Kol. Soepirman Komp. Griya Hamparan RT. 011 RW. 002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari
20	LPK STKOM SAPTA KOMPUTER	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/694/DTKP-PK/2018	Diterbitkan tanggal 29 Oktober 2018	Komputer	PUPUT IKA RETNOWATI, AMK HP. 0822 5015 5456	Jl. A. Syairani RT. 026 RW. 007 Kel. Angsau Kec. Pelaihari
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah	Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut Nomor : 503/001/DPMPPTSP/XII/2018	Diterbitkan tanggal 28 Desember 2018			
21	LPK MIMI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/264/DTKP-PK/2019	Diterbitkan tanggal 20 Maret 2019	1. Tata Rias pengantin 2. Tata Busana	RADEN AYU RIDA HERAWATI HP. 0812 5476 5454	Jl. Basuki Rahmat RT.026 RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah	Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut Nomor : 503/001/DPMPPTSP/III/2019	Diterbitkan tanggal 27 Maret 2019	3. Tata Rias Salon Kecantikan		

Tabel 1.4

C. PELAKSANA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA OLEH BLK KOMUNITAS							
NO	NAMA LEMBAGA	IZIN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS			PROGRAM / KEJURUAN	NAMA PIMPINAN/NO.HP	ALAMAT
		PEMBERI IZIN BLK KOMUNITAS	NOMOR IZIN BLK KOMUNITAS	TANGGAL IZIN BLK KOMUNITAS			
1	BLK Komunitas Ponpes Ubudiyah Bati-Bati	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Nomor : 563/288/DTKP/PPTK-PK/2018 Perihal Rekomendasi Operasional BLK Komunitas	7 Mei 2018	Komputer	H. ABDUL RAHMAN HP. 0812 5194 1005	Jl. Pesantren RT. 07 RW. 02 Desa Padang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut

Tabel 1.5

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Penta)

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan tenaga kerja meliputi pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

Pelayanan penempatan tenaga kerja pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA S.D DESEMBER 2019**

NO	URAIAN	BULAN SEBELUMNYA			BULAN INI						S.D BULAN INI		
		L	P	JUMLAH PER TAHUN	BERTAMBAH			BERKURANG			L	P	JUMLAH PER TAHUN
					L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PENCARI KERJA	3,259	2,333	5,592	43	17	60	0	0	0	3,302	2,350	5,652
B	LOWONGAN KERJA			112			1			0			113
C	PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI (PTKDN)			89			0			0			89
D	PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/ PMI	0	42	42	0	1	1	0	0	0	0	43	43
E	TENAGA KERJA ASING (TKA)	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41

Tabel 1.6

a. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja (Luasja)

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang perluasan kesempatan kerja meliputi pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT
KEADAAN s/d DESEMBER 2019**

No	Lembaga Penyelenggara	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (Org)			Anggaran	Keterangan
			L	P	JUMLAH		
A. PELATIHAN BERBASIS KEWIRUSAHAAN							
1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	12	8	20	APBD	Dilaksanakan tgl 23 s.d 24 April 2019 di Desa Benua Raya Kec.Bati-Bati
			9	11	20	APBD	Dilaksanakan tgl 19 s.d 20 Juni 2019 di Desa Tirtajaya Kec.Bajuin
			11	9	20	APBD	Dilaksanakan tgl 8 s.d 9 Juli 2019 di Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar
			5	15	20	APBD	Dilaksanakan tgl 31 Juli s.d 1 Agustus 2019 di Desa Raden Kec. Kurau
			7	13	20	APBD	Dilaksanakan tgl 28 s.d 29 Agustus 2019 di Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang
			15	5	20	APBD	Dilaksanakan tgl 7 s.d 8 Oktober 2019 di Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung
JUMLAH			59	61	120		
		Pelatihan Kewirausahaan (Entrepreneurship) dalam Manunggal Tuntung Pandang Tahun 2019	5	10	15		Dilaksanakan tanggal 12 Januari 2019 di Desa Tungkan Kecamatan Pelaihari
			10	6	16		Dilaksanakan tanggal 24 Januari 2019 di Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur
			10	5	15		Dilaksanakan tanggal 7 Februari 2019 di Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung
			8	9	17		Dilaksanakan tanggal 22 Februari 2019 di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati
			14	3	17		Dilaksanakan tanggal 8 Maret 2019 di Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang
			5	4	9		Dilaksanakan tanggal 22 Maret 2019 di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin
			15	6	21		Dilaksanakan tanggal 5 April 2019 di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau
			3	13	16		Dilaksanakan tanggal 12 April 2019 di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong
			14	16	30		Dilaksanakan tanggal 26 April 2019 di Desa Kandungan Lama Kec. Panyipatan
			18	1	19		Dilaksanakan tanggal 3 Mei 2019 di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung
			14	1	15		Dilaksanakan tanggal 14 Juni 2019 di Desa Bluru Kec. Batu Ampar
			14	0	14		Dilaksanakan tanggal 21 Juni 2019 di Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari
			1	9	10		Dilaksanakan tanggal 28 Juni 2019 di Desa Bumi Harapan Kec. Bumi Makmur
			16	0	16		Dilaksanakan tanggal 12 Juli 2019 di Desa Kayu Abang Kec. Tambang Ulang
			7	17	24		Dilaksanakan tanggal 19 Juli 2019 di Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong
			7	17	24		Dilaksanakan tanggal 26 Juli 2019 di Desa Handil Negara Kec. Kurau
			14	2	16		Dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2019 di Desa Sebamban Baru Kec. Kintap
			5	21	26		Dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2019 di Desa Ketapang Kec. Bajuin
			4	8	12		Dilaksanakan tanggal 6 September 2019 di Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati
			13	0	13		Dilaksanakan tanggal 13 September 2019 di Desa Riam Adungan Kec. Kintap
			0	12	12		Dilaksanakan tanggal 27 September 2019 di Desa Kandungan Baru Kec. Panyipatan
			19	8	27		Dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2019 di Desa Guntung Besar Kec. Pelaihari
			10	8	18		Dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2019 di Desa Pandan Sari Kec. Kintap
			0	18	18		Dilaksanakan tanggal 8 November di Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati
			14	2	16		Dilaksanakan tanggal 15 November di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong
			9	6	15		Dilaksanakan tanggal 22 November di Desa Ambawang Kec. Batu Ampar
JUMLAH			249	202	451		
JUMLAH 1 & 2			308	263	571		
B. PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT							
1.	-				0		
JUMLAH			0	0	0		
C. PELATIHAN BAGI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)							
1.	-				0		
JUMLAH			0	0	0		
TOTAL			308	263	571		

Tabel 1.7

2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Seksi Persyaratan Kerja

Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang persyaratan kerja meliputi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, hubungan kerja, kesetaraan syarat kerja, dan kesejahteraan pekerja, diantara statistik hasil kerja pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)						
TAHUN 2019						
No	Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Register	Jangka Waktu	Keterangan
1	Januari	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	3981-3983	1 tahun	3 orang
2	Januari	PT.Sinar Nusantara Industries	Desa Nusa Indah, Bati-Bati	3984-3988	1 tahun	5 orang
3	Januari	PT.Patriot Intan Abadi	Kecamatan Bati-Bati	3989-3995	1 tahun	7 orang (BHL)
4	Januari	PT.Smart Tbk	Job Site Desa Sumber Jaya, Kec Kintap	3996-4031	6 bulan s.d 1 tahun	36 orang
5	Januari	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	01 - 41	1 tahun	41 orang
6	Januari	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	42- 48	1 tahun	7 orang
7	Januari	PT.Smart Tbk	Desa Kintap	49	1 tahun	1 orang
8	Januari	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	50-54	1 tahun	5 orang
9	Februari	PT.Smart Tbk	Job Site Desa Sumber Jaya, Kec Kintap	55	1 tahun	1 orang
10	Februari	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	56-70	1 tahun	15 orang
11	Februari	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	71-80	1 tahun	12 orang
12	Februari	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	81-83	1 tahun	3 orang
13	Februari	PT.Sinar Nusantara Industries	Desa Nusa Indah, Bati-Bati	84-105	1 tahun	22 orang
14	Februari	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Ds.Damit	106-117	1 tahun	12 orang
15	Februari	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Ds.Damit	118	1 tahun	13 orang (BHL)
16	Maret	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	119-162	6 bulan	44 orang
17	Maret	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	163-178	1 tahun	16 orang
18	Maret	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	180-187	6 bulan	8 orang
19	Maret	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	188-194	6 bulan s.d 1 tahun	7 orang
20	Maret	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Ds.Damit	195-224	1 tahun	30 orang
21	Maret	PT.Sinar Nusantara Industries	Desa Nusa Indah, Bati-Bati	225-231	1 tahun	7 orang
22	Maret	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	232-279	3 s.d 6 bulan	48 orang
23	Maret	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	280-287	1 tahun	8 orang
24	Maret	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Ds.Damit	288	1 tahun	1 orang
25	April	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	289-292	3 s.d 9 bulan	4 orang
26	April	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	293-307	1 tahun	15 orang
27	April	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	308-309	7 s.d 11 bulan	2 orang
28	April	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	310-325	1 tahun	16 orang
29	April	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	326-373	2 bulan	48 orang
30	April	PT.Karya Wijaya Utama	Kintap	374-389	1 tahun	16 orang
31	April	PT.Sinar Nusantara Industries	Desa Nusa Indah, Bati-Bati	390-398	1 tahun	9 orang
32	April	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	399	1 tahun	1 orang
33	April	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Kintap	400-491	1 tahun	92 orang
34	Mei	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	492-509	1 tahun	18 orang
35	Mei	PT.Smart Tbk	Kintap	510-577	4 s.d 7 bulan	68 orang
36	Mei	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	578-627	3 s.d 6 bulan	50 orang
37	Mei	PT.JAPFA	Bati-Bati	628-650	1 tahun	23 orang
38	Mei	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	651-660	1 tahun	10 orang
39	Mei	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	661-662	4 bulan s.d 1 tahun	2 orang
40	Mei	PT.Sinar Nusantara Industries	Desa Nusa Indah, Bati-Bati	663	1 tahun	1 orang
41	Mei	PT.Pribumi Citra Megah	Kintap	664-673	1 tahun	10 orang
42	Juni	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	674-680	1 tahun	7 orang
43	Juni	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	681-689	1 tahun	9 orang
44	Juni	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	690-790	6 bulan	101 orang
45	Juni	PT.Sinar Nusantara Industries	Desa Nusa Indah, Bati-Bati	791-800	1 tahun	10 orang
46	Juni	PT.Hyundai Engineering	Desa Asam-Asam	801-803	1 tahun	3 orang
47	Juli	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	804-810	1 tahun	7 orang
48	Juli	PT.Smart Tbk	Kintap	811-820	1 tahun	10 orang
49	Juli	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	821-849	3 bulan	29 orang
50	Juli	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Ds.Damit	850-881	1 tahun	38 orang
51	Juli	PT.Nawakara	Jorong	888-957	1 tahun	70 orang
52	Juli	PT.Thiess	Kintap	958-962	6 bulan	5 orang
53	Juli	PT.Patriot Intan Abadi	Desa Pulau Sari	963-982	1 tahun	20 orang
54	Juli	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	983-1103	3 s.d 6 bulan	31 orang
55	Juli	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Ds.Damit	1014-1017	1 tahun	4 orang

56	Juli	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1018-1030	1 tahun	13	orang
57	Juli	PT.Hyundai Engineering	Asam-Asam	1031-1033	3 s.d 6 bulan	3	orang
58	Agustus	PT.Smart Tbk	Kintap	1034-1056	1 tahun	23	orang
59	Agustus	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	1057	10 bulan	1	orang
60	Agustus	PT.Hyundai Engineering	Asam-Asam	1058-1059	12 bulan	2	orang
61	Agustus	PT.Indofood Sukses Makmur	Bati-Bati	1060-1064	6 bulan	5	orang
62	Agustus	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	1065-1074	1 tahun	10	orang
63	Agustus	PT.PCMU	Kintap	1075-1120	1 tahun	45	orang
64	Agustus	PT.Karya Wijaya Utama	Kintap	1121-1122	1 tahun	2	orang
65	Agustus	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1123-1124	1 tahun	2	orang
66	Agustus	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1125-1195	3 s.d 6 bulan	71	orang
67	Agustus	PT.Smart Tbk	Damit	1196-1199	1 tahun	4	orang
68	Agustus	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1200-1214	1 tahun	15	orang
69	September	PT.Kartika Karya Nusantara	Banjarmasin-Bati Bati	1215-1224	7 bulan	10	orang
70	September	PT.Kartika Purna Yudha	Banjarmasin-Bati Bati	1225-1241	1 tahun	17	orang
71	September	PT.Panen Embun	Bati-Bati	1242	1 tahun	1	orang
72	September	PT.Kartika Purna Yudha	Banjarmasin-Bati Bati	1243-1250	1 tahun	8	orang
73	September	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	1251-1262	1 tahun	12	orang
74	September	PT.Hyundai Engineering	Asam-Asam	1263-1267	4 bulan	5	orang
75	September	PT.Karya Wijaya Utama	Kintap	1268-1273	1 tahun	6	orang
76	September	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jorong	1274-1276	1 tahun	3	orang
77	September	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jorong	1277-1283	1 tahun	7	orang
78	September	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jorong	1284-1316	1 s.d 2 tahun	33	orang
79	September	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1317-1327	3 bulan	17	orang
80	September	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1328-1334	1 tahun	7	orang
81	September	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1335-1437	6 bulan	103	orang
82	September	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	1438-1457	1 tahun	20	orang
83	September	PT.Hyundai Engineering	Asam-Asam	1458-1459	1 tahun	2	orang
84	September	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Damit	1460-1482	1 tahun	23	orang
85	Oktober	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1483-1505	6 bulan	23	orang
86	Oktober	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Damit	1506-1516	1 tahun	11	orang
87	Oktober	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Damit	1517-1548	1 tahun	32	orang
88	Oktober	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1549-1567	1 tahun	19	orang
89	Oktober	PT.Pribumi Citra Megah	Kintap	1568-1574	1 tahun	7	orang
90	Oktober	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1575-1604	6 bulan s.d 1 tahun	30	orang
91	Oktober	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1605-1622	1 tahun	18	orang
92	Oktober	PT.Hyundai Engineering	Jorong	1623-1624	6 bulan s.d 1 tahun	2	orang
93	Oktober	PT.Permata Indo Sejahtera	Banjarmasin-Pelaihari	1625-1626	1 tahun	2	orang
94	Oktober	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1627-1649	1 tahun	23	orang
95	November	PT.Hyundai Engineering	Jorong	1650-1655	1 tahun	6	orang
96	November	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1656-1664	1 tahun	9	orang
97	November	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1665-1673	3 s.d 6 bulan	9	orang
98	November	PT.Hyundai Engineering	Jorong	1674	1 tahun	1	orang
99	November	PT.Pribumi Citra Megah	Kintap	1675-1684	1 tahun	10	orang
100	November	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1685-1739	3 s.d 6 bulan	55	orang
101	November	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1740-1765	1 tahun	26	orang
102	November	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1766-1772	1 tahun	7	orang
103	November	PT.Hyundai Engineering	Jorong	1773-1777	1 tahun	5	orang
104	Desember	PT.Pribumi Citra Megah	Kintap	1778-1787	1 tahun	10	orang
105	Desember	PT.Thiess	Kintap	1788-1793	1 tahun	6	orang
106	Desember	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1794-1799	3 s.d 6 bulan	6	orang
107	Desember	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1800-1824	3 s.d 6 bulan	25	orang
108	Desember	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	1825-1834	3 s.d 6 bulan	10	orang
109	Desember	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1835-1848	1 tahun	14	orang
110	Desember	PT.Pribumi Citra Megah	Kintap	1849-1852	1 tahun	4	orang
111	Desember	PT.Hyundai Engineering	Jorong	1853	1 tahun	1	orang
112	Desember	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	1854-1868	3 s.d 6 bulan	15	orang
113	Desember	PT.Karya Surya Lestari	Kintap	1869-1872	2 s.d 6 bulan	4	orang
Jumlah						1941	orang

Tabel 1.8

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN					
TAHUN 2019					
No	Tanggal/Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Kepala Dinas	Keterangan Kode Kertas
1	Januari	PT. Deli Pratama Coal	Jl.A.Yani RT.13 Rw.03 Desa Tegalrejo Kec.Klumpang Hilir, Kotabaru	022/DTKP/HIPK-PK/I/2019	SYAKER 011-013 SYAKER 014-016
2	Februari	PT. Tirta Sukses Perkasa	Jl.A.Yani Km.36 Bati-Bati	032/DTKP/HIPK-PK/II/2019	SYAKER 037-039 SYAKER 040-042
3	Februari	PT.Kintap Jaya Wattindo	Jl.Tambirangin RT.003 Rw.009 Kintap	033/DTKP/HIPK-PK/II/2019	SYAKER 058-060 SYAKER 061-064
4	Maret	-	-	-	-
5	April	-	-	-	-
6	Mei	PT.Ebimas Besar	Jl.A.Yani Km.45,6 Desa Pulau Sari Kec.Tambang Ulang Kab.Tanah Laut	035/DTKP/HIPK-PK/V/2019	SYAKER 145-147 SYAKER 148-150
7	Mei	PT.CJ Cheiljedang Feed Kalimantan	Jl.A.Yani Km.48 Ds.Banyu Irang Kec.Bati-Bati	037/DTKP/HIPK-PK/V/2019	SYAKER 071-073 SYAKER 074-076
8	Mei	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	Jl.A.Yani Km.33,5 RT.002 Rw.002 Desa Nusa Indah Kec.Bati-Bati	038/DTKP/HIPK-PK/V/2019	SYAKER 077-079 SYAKER 080-082
9	Juni	-	-	-	-
10	Juli	-	-	-	-
11	Agustus	-	-	-	-
12	September	PT.Pola Kahuripan Inti Sawit	Kintap, Kabupaten Tanah Laut	045/DTKP/HIPK-PK/IX/2019	SYAKER 302-304 SYAKER 305-307
13	September	PT.Indoraya Everlatex	Jl.A.Yani Km 136 RT.14/05 Desa Kintapura Kec.Kintap	046/DTKP/HIPK-PK/IX/2019	SYAKER 296-298 SYAKER 299-301
14	Oktober	-	-	-	-
15	November	-	-	-	-
16	Desember	-	-	-	-

Tabel 1.9

PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA						
TAHUN 2019						
No	Tanggal dan Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor SK Pendaftaran	Jangka Waktu	Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Jl.A.Yani Km 32 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati	043/DTKP/SET-UP/VIII/2019	23 Agustus 2019 s.d 23 Agustus 2021	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1.10

PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG						
TAHUN 2019						
No	Tanggal Pencatatan	Nama Perusahaan Pemberi Kerja	Alamat	Asosiasi Perusahaan	Nomor Bukti Pelaporan	Nama Perusahaan Penyedia Jasa
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	PT.Tirta Sukses Perkasa	Jl.A.Yani Km.36 Desa Ujung Baru Bati-Bati	ASPADIN	560.279/DTKP/HIPK-PK/III/2019	PT.Prima Makmur Bersama
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	PT.PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalselteng UP2D	Jl.Mistar Cokrokusumo Km.39 Banjarbaru	APPELIN	560.678/DTKP/HIPK-PK/VI/2019	PT.PLN Tarakan
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	PT.PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalselteng UP3	Jl.Lambung Mangkurat Nomor 12	APPELIN	560.924/DTKP/HIJSTK-PK/VIII/2019	PT.PLN Tarakan
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1.11

PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN						
TAHUN 2019						
No	Tanggal Pencatatan	Nama Perusahaan Penyedia Jasa	Alamat	Nomor Pendaftaran	Perusahaan Pemberi Kerja	Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	PT.Agape Dyah Persada	Jl.Boulevard Raya Ruko Notredame Blok G-9 Kota Deltamas Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat	174/DTKP/HIPK/II/2019	PT.Charoen Phokphand Jaya Farm	SYAKER 043 SYAKER 045
3	Februari	PT.Dyfa Jaya Persada	Jl.Boulevard Raya Ruko Notredame Blok G-9 Kota Deltamas Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat	175/DTKP/HIPK/II/2019	PT.Charoen Phokphand Jaya Farm	SYAKER 044 SYAKER 046
4	Maret	-	-	-	-	-
5	April	-	-	-	-	-
6	Mei	PT.Prima Makmur Bersama	Perum Kahuripan Nirwana Blok CA-XVI/11, RT/RW : 09/07 Sumpat Sidoarjo	544/DTKP/HIPK/V/2019	PT.Tirta Sukses Perkasa	SYAKER 151 SYAKER 152
7	Juni	-	-	-	-	-
8	Juli	-	-	-	-	-
9	Agustus	-	-	-	-	-
10	September	-	-	-	-	-
11	Oktober	-	-	-	-	-
12	November	-	-	-	-	-
13	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1.12

PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH						
TAHUN 2019						
No	Bulan Pencatatan	Nama Perusahaan Penyedia Jasa	Alamat	Izin Operasional	Nomor Pencatatan	Nama Perusahaan Pemberi Kerja
1	Januari					
2	Februari	PT.Mandiri Karya Kirana	Jl.Lawu Nomor 28 Sidoarjo	KEP.561.3/033/IOP/IV/DISNAKERTRANS	170/DTKP/HIPK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019	PT.Japfa Comfeed Indonesia
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jl.A.Yani Perum Widya Citra Graha Blok B No.9 Desa Asam Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Kalsel	KEP.561.3/062/IOP/VIII/DISNAKERTRANS	492/DTKP/HIPK/IV/2019 tanggal 22 April 2019	PT.Pama Persada Nusantara Distrik Aria
5	April	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jl.A.Yani Perum Widya Citra Graha Blok B No.9 Desa Asam Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Kalsel	KEP.561.3/062/IOP/VIII/DISNAKERTRANS	498/DTKP/HIPK/IV/2019 tanggal 22 April 2019	PT.Kalimantan Prima Persada
6	April	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jl.A.Yani Perum Widya Citra Graha Blok B No.9 Desa Asam Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Kalsel	KEP.561.3/062/IOP/VIII/DISNAKERTRANS	513/DTKP/HIPK/IV/2019 tanggal 22 April 2019	PT.Pama Persada Nusantara Distrik Aria
7	Mei	-	-	-	-	-
8	Juni	-	-	-	-	-
9	Juli	PT.Nawakara Perkasa Nusantara	Jl.A.Yani Km.121 RT.12 Desa Asam-Asam Jorong Tanah Laut	188.48/156/IOP/V/DPMPTSP/2017	902/DTKP/HIJSTK-PK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019	PT.Arutmin Indonesia
10	Agustus	PT.Prima Karya Sarana Sejahtera	Jln.Gatot Subroto Nomor 17 H RT.29 Banjarmasin	KEP.561.3/075/IOP/IX/DISNAKERTRANS	934/DTKP/HIJSTK-PK/VII/2019 tanggal 12 Agustus 2019	PT.Malindo Feedmill Tbk
11	September	-	-	-	-	-
12	Oktober	PT.Permata Indo Sejahtera	Jl.A.Yani Km.3,5 Komplek Karang Paci Ruko No.2 RT.5 Rw.5	503/4/IOP/DS-DPMPTSP/III/2019	1173/DTKP/HIJSTK-PK/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk
13	November	-	-	-	-	-
14	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1.13

DAFTAR PERMOHONAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL					
TAHUN 2019					
No	Bulan Pencatatan	Nama Perusahaan Penyedia Jasa	Alamat	Izin Operasional Awal	Nomor Surat Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	PT.Mandiri Karya Kirana	Jl.A.Yani Km.35,5 Nusa Indah Kec.Bati-Bati	KEP.561.3/033/IOP/IV/DISNAKERTRANS	560/502/DTKP/HIPK-HI/IV/2019
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	PT.Anugerah Emas Alihdaya	Jl.A.Yani Km 123 Komp Perum Wijaya Citra Graha Blok B 9 Asam-	KEP.561.3/062/IOP/VIII/DISNAKERTRANS	560/897/DTKP/HIJSTK-PK/VIII/2019
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

Tabel 1.14

DATA STATISTIK PERSYARATAN KERJA (KONDISI PERTAHUN)

No	Indikator	Sub Indikator	Definisi	Tahun						Keterangan
				2017		2018		2019		
				Nominal	Satuan	Nominal	Satuan	Nominal	Satuan	
1	Kepatuhan terhadap pelaksanaan norma persyaratan kerja pada bidang ketenagakerjaan									
		Jumlah Perusahaan yang melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan	9	Perusahaan	16	Perusahaan	6	Perusahaan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
		Jumlah Perusahaan yang melakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak	2	Perusahaan	2	Perusahaan	0	Perusahaan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
		Jumlah pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang kontrak kerjanya dicatatkan	Kontrak atau dokumen dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah dokumen perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu	1155	Orang	2093	Orang	1941	Orang	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
2	Kepatuhan pelaksanaan pelimpahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
		Jumlah Perusahaan yang melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang	Pelaporan jenis pekerjaan penunjang adalah salah satu proses pelaporan awal yang dilakukan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan yang memuat jenis pekerjaan berdasarkan alur kegiatan yang telah diterbitkan Asosiasi Sektor Usaha dalam rangka penyerahan sebagian jenis pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui metode pemborongan	2	Perusahaan	6	Perusahaan	2	Perusahaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
		Jumlah Perusahaan yang melakukan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan	Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan adalah kegiatan mendaftarkan perjanjian pemborongan yang telah disepakati oleh Pemberi dan Penerima sebagian pekerjaan yang memuat syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	Perusahaan	3	Perusahaan	3	Perusahaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
		Jumlah permohonan Perusahaan yang melakukan pendaftaran penyediaan jasa pekerja/buruh	Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh Perusahaan penyedia Jasa pekerja untuk melakukan pendaftaran terhadap perjanjian penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang telah disepakati oleh pihak Pemberi Pekerjaan dan pihak	-	Pemohonan Perusahaan	8	Pemohonan Perusahaan	4	Pemohonan Perusahaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
		Jumlah Perusahaan yang melakukan permohonan evaluasi kinerja perusahaan dalam rangka perpanjangan izin operasional	Evaluasi kinerja perusahaan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Undang-Undang kepada instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan Kabupaten untuk melakukan evaluasi terhadap Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh sebagai bahan pertimbangan bagi Provinsi untuk menerbitkan perpanjangan izin operasional	-	Perusahaan	0	Perusahaan	1	Perusahaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Tabel 1.15

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi standarisasi dan fasilitasi pengupahan, pengembangan pengupahan, program jaminan sosial dan kepesertaan jaminan sosial, pada tahun 2019 dalam pelaksanaan tugasnya dapat tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut :

INDEKS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK KEPESERTAAN FORMAL				
Dasar : Laporan BPJS Nomor B/1735/122019				
Tanggal : DESEMBER 2019				
No	Instansi	Jumlah	Satuan	Keterangan
PEGAWAI PEMERINTAH NON ASN				
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	179	Orang	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1770	Orang	
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	13	Orang	
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10	Orang	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18	Orang	
6	Dinas Perhubungan	18	Orang	
7	Satpol PP dan Damkar	117	Orang	
8	Sekretariat Daerah	16	Orang	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43	Orang	
10	RSUD Haji Boedjasin	472	Orang	
11	Dinas Kesehatan	157	Orang	
12	Balai Latihan Kerja	6	Orang	
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	48	Orang	
14	Kecamatan Panyipatan	8	Orang	
15	Kecamatan Kintap	9	Orang	
16	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	49	Orang	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	Orang	
18	Inspektorat	7	Orang	
19	Kelurahan Karang Taruna	3	Orang	
20	Kelurahan Bajuin	8	Orang	
21	Kelurahan Kurau	5	Orang	
22	Kelurahan Bumi Makmur	7	Orang	
23	Kelurahan Pabahanan	2	Orang	
24	Dinas Pariwisata	26	Orang	
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24	Orang	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	15	Orang	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	Orang	
28	Dinas Sosial	14	Orang	
29	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah	12	Orang	
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Orang	
31	Badan Pendapatan Daerah	11	Orang	
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	Orang	
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Orang	
34	Kelurahan Angsau	3	Orang	
35	Kecamatan Takisung	24	Orang	
36	Kecamatan Bati-Bati	5	Orang	
37	Kecamatan Batu Ampar	6	Orang	
38	Kecamatan Jorong	6	Orang	
39	Kecamatan Tambang Ulang	5	Orang	
40	Kelurahan Sarang Halang	2	Orang	
41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77	Orang	
42	Sekretariat DPRD	60	Orang	
43	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	15	Orang	
44	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	15	Orang	
	JUMLAH	3350	Orang	

	APARATUR PEMERINTAHAN DESA			
1	PPNPN Desa Pandan Sari	10	Orang	
2	Kantor Desa Tabunio	9	Orang	
3	Kantor Desa Banyu Irang	4	Orang	
4	Kantor Desa Pandahan	10	Orang	
	JUMLAH	33	Orang	
	BADAN USAHA			
1		17287	Orang	406 Badan Usaha
	JUMLAH	17287	Orang	406 Badan Usaha
1	PEKERJA RUMAH TANGGA	0	Orang	
	JUMLAH	0	Orang	
	TOTAL	20670	Orang	
	PEKERJA JASA KONSTRUKSI			
1		144	Proyek Jaskon	
	JUMLAH	144	Proyek Jaskon	
	TOTAL	144	Proyek Jaskon	

Tabel 1.16

c. Seksi Hubungan Industrial

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial meliputi pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, kerjasama dan pemasyarakatan hubungan industrial, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemberdayaan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mediator, pada tahun 2019 dalam pelaksanaan tugasnya dapat tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut :

DATA JUMLAH LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT				
TAHUN 2019				
NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NOMOR BUKTI PENCATATAN	KETERANGAN
1	PT. Gawi Makmur Kalimantan PKS Jorong	Desa Damit Hulu RT. 014 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	001/LKS-B/IV/2019	tanggal pencatatan 02 April 2019
2	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah.	Desa Damit Hulu RT. 013 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	002/LKS-B/VI/2019	tanggal pencatatan 26 Juni 2019
3	PT. Darma Henwa Tbk - ACP	Jl. A. Yani Km. 130 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	04/DTKTS/HIPK/XII/2016	tanggal pencatatan 22 Desember 2016, tanggal pencatatan kembali 16 Juli 2019
4	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Jl. A. Yani Km. 35,5 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	003/LKS-B/IX/2019	tanggal pencatatan 30 September 2019

5	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Unit Farm 30	Jl. Guntung Gasak RT 06 RW 03 Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	004/LKS-B/IX/2019	tanggal pencatatan 30 September 2019
6	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 32 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut.	005/LKS-B/XI/2019	tanggal pencatatan 15 November 2019
7	PT. Darma Henwa Tbk - ACP	Jl. A. Yani Km. 130 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.	006/LKS-B/XII/2019	tanggal pencatatan 09 Desember 2019
8	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Barat	Desa Damit Hulu RT. 017 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70882	003/LKS-B/IV/2018	tanggal pencatatan 02 April 2018, tanggal pencatatan kembali 06 Maret 2019
TOTAL			8	

Tabel 1.17

DATA JUMLAH SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH (SP/SB)								
TAHUN 2019								
NO.	NAMA SP/SB	ALAMAT	JARINGAN ORGANISASI				TERGABUNG DALAM FEDERASI/KONFEDERASI	
			MANDIRI		BERAFILIASI		FEDERASI	KONFEDERASI
			DALAM HUBUNGAN KERJA	LUAR HUBUNGAN KERJA	DALAM HUBUNGAN KERJA	LUAR HUBUNGAN KERJA		
1.	Serikat Pekerja Mandiri PT. Smart Tbk. Perkebunan Kintapura	Desa Salaman Km. 14 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	√					
2.	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia CV. Musda Lestari	Jl. Lapangan Bola RT. 05/RW. 02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			√		DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSPSI Pimpinan Samsir Mahmud, S.H.	DPD KSPSI Kalimantan Selatan Pimpinan H. Syahrin Sulaiman
3.	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Sinar Nirwana Sari	Jl. A. Yani Km. 103 Desa Karang Rejo RT. 01/RW. 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			√		DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSPSI Pimpinan Samsir Mahmud, S.H.	DPD KSPSI Kalimantan Selatan Pimpinan H. Syahrin Sulaiman
4.	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Karya Wijaya Utama	Jl. A. Yani Km. 150 RT. 08/RW. 03 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			√		DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSPSI Pimpinan Samsir Mahmud, S.H.	DPD KSPSI Kalimantan Selatan Pimpinan H. Syahrin Sulaiman
5.	Serikat Pekerja Mandiri "Bersama Sejahtera" PT. Citra Putra Kebun Asri	Jl. A. Yani Km. 97 RT001/001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	√					
6.	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Jl. A. Yani Km. 32 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			√			DPD KSPSI Kalimantan Selatan Pimpinan H. Syahrin Sulaiman

Tabel 1.18

DATA PHK S.D DESEMBER 2019					
No.	Perusahaan	Bidang Usaha	Alasan PHK	Alamat Perusahaan (Kecamatan)	Jumlah PHK (Orang)
Jumlah data PHK/berakhir kontrak/mengundurkan diri/pensiun Bulan Januari - Nopember 2019					269
1	PT. BRIDGESTONE	Perkebunan	Pensiun	Bati-Bati	1
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	Perbankan	PHK	Bati-Bati	1
3	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	Perbankan	PHK	Kintap	1
4	PT. BRIDGESTONE	Perkebunan	Pensiun Dini	Bati-Bati	1
TOTAL					273

Tabel 1.19

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. M. Effendi Batubara Sdr. Dina Elisa	PT. Perkebunan Nusantara XIII		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
2	Sdr. Ruspansyah	PT. Darma Henwa		V		Selesai dengan PB
3	Sdr. Dwi Heru Cahyono	PT. Darma Henwa		V		Selesai dengan Anjuran
4	Sdr. Hairun Ely Rahman dkk.	CV. Musda Lestari		V		Selesai dengan PB
5	Sdr. Sumindar Sinaga	PT. Jafpa Comfeed Tbk			V	Selesai dengan Anjuran
6	Sdr. Edy Karyono	PT. Darma Henwa		V		Berkas dikembalikan
7	Sdr. Ali Kusno	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Akhmad Rizki Pradana dkk.	PT. Prima Karya Sarana Sejahtera		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
9	Sdr. Muhammad Agus	PT. Kartika Karya Nusantara		V		Selesai dengan PB
10	Sdr. Fronika Ratno Timur Sdr. Muhammad Bisri	PT. Madhani Talafah Nusantara		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
11	Sdr. Suwarno dan SPSI PT. BKP	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

Tabel 1.20

2. Bidang Perindustrian

a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan sumber daya industri, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengembangan teknologi industri, pada tahun 2019 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah peserta pelatihan		20	0	20	20	0	30	0	20	40	20	0
Kumulatif jumlah peserta pelatihan		20	20	40	60	60	90	90	110	150	170	170
Indikator	Target		Realisasi	Definisi					Sumber Data			
Jumlah IKM yang dilatih Berbasis Teknologi	140 IKM		140 IKM	IKM yang mendapatkan pelatihan dan wawasan mengenai pengembangan dan penerapan teknologi dalam industri					Internal (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bidang Perindustrian)			
Jumlah IKM dilatih berbasis Sumber Daya Alam	30 IKM		30 IKM	IKM yang mendapatkan pelatihan dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk diolah dalam proses industri agar bernilai jual tinggi.					Internal (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bidang Perindustrian)			

Tabel 1.21

b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan industri kecil dan industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri, dan pengolahan data dan informasi industri, pada tahun 2019 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri yang diterbitkan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
- Rekomendasi IUI/TDI	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabel 1.22

Data Statistik Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Laut

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah IKM	0	0	0	0	0	0	0	0	50	150	100	187
Jumlah IKM Kumulatif	0	0	0	0	0	0	0	0.00	50.00	200.00	300.00	487.00

Tabel 1.23

Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2019 sebanyak 487.

Progress Pembangunan Gedung Promosi Sentra IKM

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Persentasi Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	3.75	17.00	21.28	28	30
Kumulatif Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	3.75	20.75	42.03	70.03	100.00

Tabel 1.24

c. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang kerjasama, pengawasan perizinan dan pengendalian, dan promosi investasi industri, pada tahun 2019 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Data Statistik Jumlah Pameran yang diikuti

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah Pameran yang diikuti	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	2.00	1.00

Tabel 1.25

Data Statistik Jumlah Peserta Pelatihan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah peserta pelatihan	20	0	30	0	0	25	0	0	10	80	20	20
Kumulatif jumlah peserta pelatihan	20	20	50	0	0	75	75	75	85	165	185	205

Tabel 1.26

3. UPT Balai Latihan Kerja

UPT BLK melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam hal Pelatihan Berbasis Kompetensi, pada tahun 2019 melaksanakan beberapa pelatihan sebagaimana tabel berikut :

NO	LEMBAGA PENYELENGGARA	JENIS	KEJURUAN	JUMLAH PESERTA (Org)			JUMLAH KELULUSAN		SUMBER DANA	KETERANGAN
				L	P	JUMLAH	PELATIHAN / PEMAGANGAN	UJI KOMPETENS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)										
1	BLK PELAIHARI	PBK Institutional Non Boarding	Juru Las SMAW 3G	48		48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pembuatan Pupuk Organik	26	6	32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Service Sepeda Motor Konvensional	48		48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Service Sepeda Motor Injeksi	48		48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pemasangan Istalasi Otomasi Listrik Industri	30	2	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Instalasi Penerangan	29	3	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	14	2	16	16		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Tukang Pasang Pondasi Batu Alam	16		16	16		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Mengerjakan Finishing Teknik Semprot	32		32	32	16	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Drafter 2D	26	6	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Furniture Alumunium	32		32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Bangunan Batu dan Beton	16		16	16		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Operator Menjahit Pakaian Dasar	4	44	48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Menjahit Pakaian Sesuai Style	1	31	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pengolahan Hasil Perikanan		32	32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pengolahan Hasil Pertanian	2	30	32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan
			Perawatan AC Split	32		32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Operator Basic Office	24	24	48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Practical Office Advanced	16	16	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Desain Grafis	22	26	48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Video Editing	20	12	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pembuatan Roti dan Kue		48	48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Tata Rias Pengantin		48	48	48	48	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Tata Rias Kecantikan Rambut		32	32	32	16	APBN	Selesai Dilaksanakan
JUMLAH PBK Non Boarding				486	338	848	848	640		
		PBK Mobile Training Unit/ Non Institutional	Juru Las SMAW 3G	32		32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar dan Desa Pandan Sari Kec. Kintap)
			Pembuatan Pupuk Organik	24	8	32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan)
			Service Sepeda Motor Konvensional	32		32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Service Sepeda Motor Injeksi	16		16	16	16	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Instalasi Penerangan	16		16	16	16	APBN	Selesai Dilaksanakan

			Furniture Alumunium	32		32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan dan Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau)
			Bangunan Batu dan Beton	32		32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Kayu Abang Kec. Tambang Ulang)
			Operator Menjahit Pakaian Dasar		32	32	32	32	APBN	Selesai dilaksanakan (Desa Bukit Mulia Kec. Kintap)
			Menjahit Pakaian Sesuai Style		32	32	32	32	APBN	Selesai dilaksanakan (Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur)
			Pengolahan Hasil Perikanan		32	32	32		APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Sungai Bakar Kec. Bajuin)
			Perawatan AC Split	32		32	32	16	APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong)
			Operator Basic Office	11	5	16	16	16	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Pembuatan Roti dan Kue		16	16	16	16	APBN	Selesai Dilaksanakan
			Tata Rias Pengantin		32	32	32	32	APBN	Selesai Dilaksanakan (Desa Benua Tengah Kec. Takisung dan Desa Ujung Kec. Bati-Bati)
			Tata Rias Kecantikan Rambut		32	32	32	32	APBN	Selesai dilaksanakan Paket 1 (Desa Handil Negara Kec. Kurau)
JUMLAH PBK MTU				227	189	416	416	272		
JUMLAH PBK Non Boarding & PBK MTU				713	527	1264	1264	912		

Tabel 1.27

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib (Bidang Ketenagakerjaan)

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (UPT.BLK)
 - a) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
 - b) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
 - c) Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
 - b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - c) Kerjasama pendidikan dan pelatihan
 - d) Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 - e) Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan
 - f) Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a) Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- c) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada urusan Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	39,954,850	39,154,800	98.00
1	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	39,954,850	39,154,800	98.00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	618,303,050	357,329,300	57.79
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	8,035,000	2,090,600	26.02
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja	276,480,250	124,807,400	45.14
3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	22,956,100	17,532,000	76.37
4	Penyiapan Tenaga kerja siap pakai	124,284,000	78,091,000	62.83
5	Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	74,578,300	34,628,900	46.43
6	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	111,969,400	100,179,400	89.47
3	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	166,294,500	119,004,500	71.56
1	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industri	64,775,000	30,290,000	46.76
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	27,520,000	19,530,000	70.97
3	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	58,529,000	57,509,000	98.26
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,470,500	11,675,500	75.47

4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerjaan (UPT. BLK)	1,073,571,910	463,494,700	43.17%
1	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	30,600,000	27,000,000	88.24%
2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	45,000,000	45,000,000	100 %
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	647,971,910	167,141,000	25.79%
4	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	350,000,000	224,353,700	64.10%
	JUMLAH	1,898,124,310	978,983,300	51.57

Tabel 2.1

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Belum terpenuhinya standar kompetensi tenaga kerja lokal.
- Belum maksimalnya pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Masih terdapatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Solusi :

- Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan kewirausahaan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif
- Peningkatan Pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).

2. Urusan Pilihan (Bidang Perindustrian)

a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Bidang Perindustrian Tahun 2019 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada urusan pilihan Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

- a) Pengembangan sistem inovasi teknologi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a) Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - a) Pembinaan kemampuan teknologi industri
4. Program Penataan Struktur Industri
 - a) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
 - b) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DAK)
 - c) Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a) Pengembangan potensi unggulan daerah

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada urusan Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	505,893,000	491,008,308	97.06
1	Pengembangan potensi unggulan daerah	505,893,000	491,008,308	97.06
2	Program Peningkatan IPTEK sistem produksi	854,046,000	484,407,800	56.72
1	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	854,046,000	484,407,800	56.72
3	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	27,000,000	21,233,600	78.64

1	Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	27,000,000	21,233,600	78.64
4	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	202,500,000	178,105,738	87.95
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	202,500,000	178,105,738	87.95
5	Program Penataan struktur industri	2,826,365,500	2,198,948,878	77.80
1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	639,453,200	162,968,500	25.49
2	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	187,136,300	140,612,700	75.14
3	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DAK)	1,999,776,000	1,895,367,678	94.78
	JUMLAH	4,415,804,500	3,373,704,324	76.40

Tabel 2.2

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Sektor industri belum tertata secara maksimal.
- Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.

2. Solusi :

- Penataan sektor industri
- Peningkatan pertumbuhan industri kecil menengah

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kesekretariatan)

a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Kesekretariatan Tahun 2019 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
 - l) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 3. Program kerjasama informasi dengan mas media
 - a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) SKPD

UPT. BLK

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesekretariatan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

a. Dinas

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,140,522,911	1,065,343,050	93.41
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,888,437	132,604,381	87.88
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27,952,900	24,574,900	87.92
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,297,500	5,534,200	87.88
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,750,000	15,000,000	95.24
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,673,700	13,657,400	99.88
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,099,950	8,099,800	100.00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,802,000	5,268,200	90.80
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,683,000	6,426,000	96.15
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,954,000	18,646,000	98.38
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	488,790,000	488,790,000	100.00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	39,000,000	37,305,000	95.65
12	Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	358,631,424	309,437,169	86.28

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362,976,008	347,627,500	95.77
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0	0	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	59,200,000	55,934,300	94.48
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	290,550,808	279,542,200	96.21
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	13,225,200	12,151,000	91.88
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000	11,000,000	61.11
1	Pendidikan dan pelatihan formal	18,000,000	11,000,000	61.11
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	6,299,950	6,293,900	99.90
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,299,950	6,293,900	99.90
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6,299,900	6,208,400	98.55
1	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	6,299,900	6,208,400	98.55
	JUMLAH	1,534,098,769	1,436,472,850	93.63

b. UPT. BLK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365,477,716	271,711,215	74.34%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129,549,732	54,956,076	42.42%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	11,175,300	7,967,050	71.29%
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000	130,000	3.61%

4	Penyediaan alat tulis kantor	8,983,600	6,629,000	73.79%
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1,349,700	1,175,100	87.06%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,696,600	2,241,000	83.10%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000	2,250,000	100 %
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,680,000	93.33%
9	Penyediaan makanan dan minuman	2,250,000	270,000	12.00%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	65,534,850	93.62%
11	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	131,822,784	128,878,139	97.77%

Tabel 2.3

d. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan pada pencapaian kinerja bidang Kesekretariatan.

4. Urusan Pemerintahan Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud

BAB III

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi memberikan Tugas Pembantuan kepada Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 79 Paket kejuruan selama Tahun 2019.

a) Dasar Hukum

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka peran dan fungsi pemerintah pusat telah bergeser. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak lagi berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana tetapi bergeser menjadi regulator, mediator, motivator dan fasilitator. Konsekwensi logis dari perubahan ini adalah sistem dan mekanisme kerjasama antar lembaga pelatihan dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip saling ketergantungan positif, saling menguntungkan dalam mewujudkan otonominya masing-masing. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja perlu menempatkan pencari kerja, para penganggur maupun tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan/ skill nya sebagai pelaku utama perlu program yang terpadu, sinergi dan relevan agar sumber daya pelatihan dapat berjalan dengan optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Pengembangan metode Pelatihan bersifat bottom up (berdasarkan aspirasi/ kebutuhan masyarakat) sangat tepat, karena akan lebih terarah pada usaha pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Community Empowerment and Community Development). Karena dalam metode ini masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program pelatihan (partisipatif) mulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pelatihan, pelaksanaan tahap evaluasi pasca pelatihan maupun pendampingan. Upaya pembinaan masyarakat ini bersifat berkelanjutan, karena tujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri tidak dapat dicapai seketika, memerlukan waktu yang lama.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2019, memiliki peran dalam pembangunan sumberdaya manusia melalui Pelatihan maupun peningkatan kemampuan, keterampilan/ skill dan kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut, di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan dan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, selain itu juga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pelaksana maupun tenaga kerja serta mengantisipasi kesenjangan kemampuan dan keterampilan, selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan.

b). Instansi Pemberi Tugas Pembantuan / Dana Dekonsentrasi

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menjalankan peran dari sebagian unsur pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2019 Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang realisasinya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dana Pemerintah yang dituangkan dalam DIPA Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi (BBPLK) Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-026.13.2.452558/2020 Tanggal 05 Desember 2018, yang meliputi kegiatan administrasi maupun kegiatan-kegiatan operasional pelatihan Berbasis Kompetensi.

c) Program, Kegiatan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 rencana pelaksanaan kegiatan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut :

Rencana Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut, meliputi kegiatan :

No	Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Paket	Jumlah Total Peserta (orang)	Waktu Pelaksanaan (hari)	Lokasi Pelaksanaan
	MAK 4060.072.003.051				
1.	Juru Las (Welder) SMAW 3G	3 Paket	48 orang	32 hari	BLK Tanah Laut
2.	Pembuatan Pupuk Organik	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
3.	Servis Sepeda Motor Konvensional	3 Paket	48 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
4.	Servis Sepeda Motor Injeksi	3 Paket	48 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
5.	Pemasangan Listrik Otomasi Industri	1 Paket	16 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
6.	Instalasi Penerangan	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
7.	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	1 Paket	16 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
8.	Tukang Pasang Pondasi Batu Alam	1 Paket	16 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
9.	Mengerjakan Finishing Teknik Semprot	2 Paket	16 orang	24 har	BLK Tanah Laut
10.	Dafter Bangunan	2 Paket	16 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
11.	Forniture Almunium	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
12.	Bangunan Batu dan Beton	1 Paket	16 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
13.	Operator Menjahit Pakaian Dasar	3 Paket	48 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
14.	Menjahit Pakaian sesuai Style	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
15.	Pengolahan Hasil Perikanan	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
16.	Pengolahan hasil Pertanian	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
17.	Perawatan AC Split	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
18.	Operator Basic Office	3 Paket	48 orang	20 hari	BLK Tanah Laut
19.	Practical Office Advancend	2 Paket	32 orang	24 hari	BLK Tanah Laut
20.	Desain Grafis	3 Paket	48 orang	28 hari	BLK Tanah Laut
21.	Vidio Editing	2 Paket	32 orang	22 hari	BLK Tanah Laut
22.	Pembuatan Roti dan Kue	3 Paket	48 orang	22 hari	BLK Tanah Laut
23.	Tata Rias Pengatin	3 Paket	48 orang	28 hari	BLK Tanah Laut
24.	Tata Rias Kecantikan Rambut	2 Paket	32 orang	28 hari	BLK Tanah Laut
	MAK 4060.072.003.052				
1.	Juru Las (Welder) SMAW 3G	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Gunung Mas dan Pandan Sari

No	Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Paket	Jumlah Total Peserta (orang)	Waktu Pelaksanaan (hari)	Lokasi Pelaksanaan
2.	Pembuatan Pupuk Organik	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Kandangan Baru dan Martadah Baru
3.	Servis Sepeda Motor Konvensional	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Bumi Harapan dan Padang
4.	Servis Sepeda Motor Injeksi	1 Paket	16 orang	22 Hari	Ds. Kampung Baru
5.	Instalasi Penerangan	1 Paket	16 orang	22 Hari	Ds. Swarangan
6.	Furniture Aluminium	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Batu Tungku dan Tambak Sarinah
7.	Bangunan Batu dan Beton	1 Paket	16 orang	22 Hari	Ds. Ketapang dan Kayu Abang
8.	Operator Menjahit Pakaian Dengan Mesin	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Birayang Atas dan Sarang Halang
9.	Menjahit Pakaian sesuai Style	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Bukit Mulya dan Pasir Putih
11.	Pengolahan Hasil Perikanan	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Sungai Bakar dan Raden
12.	Perawatan AC Split	1 Paket	16 orang	22 Hari	Ds. Jilatan
13.	Operator Basic Office	1 Paket	16 orang	22 Hari	Ds. Kuala Tambangan
14.	Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket	16 orang	22 Hari	Ds. Bajuin
15.	Tata Rias Pengatin	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Benua Tengah dan Ujung
16.	Tata Rias Kecantikan Rambut	2 Paket	32 orang	22 Hari	Ds. Handil Negara dan Sungai Pinang
	JUMLAH	79 Paket	1.264 orang		

Tabel 3.1

d) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

sejauh ini sarana dan prasarana masih cukup memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi walaupun sebagian work shop masih memerlukan peralatan yang lebih bagus lagi untuk menghasilkan peserta yang kompeten sesuai dengan misi BLK yaitu menghasilkan para manusia yang trampil dan kompeten.

Tahun 2019 BLK mendapatkan 79 paket pelatihan dengan satu kejuruan mendapatkan beberapa paket kegiatan, disini lah terdapat kendala karena peralatan dan workshop hanya dapat digunakan untuk satu orang instruktur saja sehingga pelatihan harus dilakukan bebrapa tahap.

e) Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan

Dalam mendukung kegiatan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut tersedia dana melalui DIPA Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-026.13.2.452558/2020 Tanggal 05 Desember 2018, untuk BLK Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi dana sebesar 5.343.520.000,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) meliputi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dana program tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi , dengan rencana anggaran belanja program tahun 2019 sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	5.343.520.000
	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK Kab. Tanah Laut (79 Paket)	
JUMLAH		5.343.520.000

Tabel 3.2

Jumlah anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas beberapa kegiatan yaitu :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4060.051.027.051	Administrasi Kegiatan	618.090.000
4060.072.002.051	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Non Boarding)	3.436.455.000
4060.072.002.052	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Mobile Training Unit)	1.288.975.000
JUMLAH		5.343.520.000

Tabel 3.3

f). Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019.

No	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Paket/ Peserta	L	P	Realisasi Jumlah Akt/Peserta	%	Ket.
	MAK 2221.072.003						
1.	Juru Las (Welder) SMAW 3G	3 Pkt/48 Org	48		48	100	-
2.	Pembuatan Pupuk Organik	2 Pkt/32 Org	25	7	32	100	-
3.	Servis Sepeda Motor Konvensional	3 Pkt/48 Org	48		48	100	-
4.	Servis Sepeda Motor Injeksi	3 Pkt/48 Org	48		48	100	-
5.	Pemasangan Listrik Otomasi Industri	2 Pkt/32 Org	30	2	32	100	-
6.	Instalasi Penerangan	2 Pkt/32 Org	32		32	100	-
7.	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	1 Pkt/16 Org	16		16	100	-
8.	Tukang Pasang Pondasi Batu Alam	1 Pkt/16 Org	16		16	100	-
	Mengerjakan Finishing Teknik Semprot	2 Pkt/32 Org	32		32	100	
9.	Dafter Bangunan	2 Pkt/32 Org	25	7	32	100	-
10.	Furniture Almunium	2 Pkt/32 Org	32		32	100	-
11.	Bangunan Batu dan Beton	1 Pkt/16 Org	16		16	100	-
12.	Operator Menjahit Pakaian Dasar	3 Pkt/48 Org	4	44	48	100	
13.	Menjahit Pakaian sesuai Style	3 Pkt/48 Org	5	27	48	100	
14.	Pengolahan Hasil Perikanan	2 Pkt/32 Org	4	28	32	100	
15.	Pengolahan Hasil Pertanian	2 Pkt/32 Org	2	30	32	100	
16.	Perawatan AC Split	2 Pkt/32 Org	17	15	32	100	
17.	Operator Basic Office	3 Pkt/48 Org	14	34	48	100	
18.	Practical Office Advancend	2 Pkt/48 Org	15	17	48	100	
19.	Desain Grafis	3 Pkt/32 Org	25	23	48	100	
20.	Vidio Editting	2 Pkt/32 Org	13	19	32	100	
21.	Pembuatan Roti dan Kue	3 Pkt/48 Org		48	48	100	

No	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Paket/ Peserta	L	P	Realisasi Jumlah Akt/Peserta	%	Ket.
22.	Tata Rias Pengatin	3 Pkt/48 Org		48	48	100	
23.	Tata Rias Kecantikan Rambut	2 Pkt/32 Org		32	32	100	-
	Jumlah		476	372	848		
	MAK 4060.072.003						
1.	Juru Las SMAW 3G	2 Pkt/32 Org	31	1	32	100	-
2.	Pembuatan Pupuk Organik	2 Pkt/32 Org	24	8	32	100	-
3.	Servis Sepeda Motor Konvensional	2 Pkt/32 Org	32		32	100	-
4.	Servis Sepeda Motor Injeksi	1 Pkt/32 Org	16		16	100	
5.	Instalasi Penerangan	1 Pkt/32 Org	16		16	100	-
6.	Furniture Almunium	2 Pkt/32 Org	32		32	100	-
7.	Bangunan Batu dan Beton	2 Pkt/32 Org	32		32	100	-
8.	Menjahit Pakaian Dengan Mesin	2 Pkt/32 Org	8	24	32	100	-
9.	Menjahit Pakaian sesuai Style	2 Pkt/32 Org	2	30	32	100	-
10.	Pengolahan Hasil Perikanan	2 Pkt/32 Org		32	32	100	-
11.	Perawatan AC Split	2 Pkt/32 Org	32		32	100	-
12.	Operator Basic Office	1 Pkt/32 Org	11	5	16	100	-
13.	Pembuatan Roti dan Kue	1 Pkt/32 Org		16	16	100	-
14.	Tata Rias Pengatin	2 Pkt/32 Org		32	32	100	
15.	Tata Rias Kecantikan Rambut	2 Pkt/32 Org		32	32	100	
	Jumlah		236	180	416		

Tabel 3.4

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	5.343.520.000	4.943.932.095	92,52 %	100 %

Tabel 3.5

dengan rincian kegiatan yaitu :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
4060.051.027.051	Administrasi Kegiatan	618.090.000	573.598.345	92,80 %	100 %
4060.072.002.051	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Non Boarding)	3.436.455.000	3.147.815.750	91,60 %	100 %
4060.072.002.052	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Mobile Training Unit)	1.288.975.000	1.222.518.000	94,84 %	100 %
JUMLAH		5.343.520.000	4.943.932.095	92,52 %	100 %

Tabel 3.6

g). PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Jumlah pegawai tetap (PNS) yang ada di Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut pada bulan Januari 2019 hanya 16 orang, untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut, maka masih diperlukan adanya penambahan tenaga/ pegawai baru, hal ini disebabkan karena semakin padatnya kegiatan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut. Untuk rencana ke depan, perlu adanya penambahan dan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk langkah regenerasi kepegawaian, mengingat usia pegawai di Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut yang ada banyak yang telah memasuki usia menjelang pensiun (masa pensiun kurang dari 5 tahun ke depan). Hal ini dirasakan perlu untuk mendukung

pelaksanaan Tupoksi Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut agar dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut dimasa depan, maka diperlukan SDM pendukung yang lebih profesional dan memiliki kompetensi yang lebih baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan pendidikan dan bimbingan teknis yang mendukung dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai, baik petugas Instruktur pelatihan kerja sebagai ujung tombak kegiatan pelayanan pelatihan maupun pegawai non struktural. Demikian juga dengan jumlah pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

UPAYA TINDAK LANJUT (SOLUSI)

1. Untuk mengatasi permasalahan perihal kekurangan dan pengembangan pegawai, Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya tindak lanjut berupa pembuatan dan pengajuan daftar kebutuhan pegawai dan di dalamnya terdapat informasi tentang jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan kepada Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
2. Pengajuan daftar rencana pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi.
3. Pengajuan Anggaran berupa Rehab workshop baik melalui APBD maupun APBN.
4. Pengajuan Anggaran pembelian peralatan pelatihan baik melalui APBD maupun APBN, serta permintaan tambahan peralatan kepada Lemsar Kementerian Tenaga kerja RI.

BAB IV

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Kerja Sama Daerah

A.a. Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

a. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

b. Bidang kerjasama

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi :
 - a. Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Tanah Laut
 - b. Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Laut
 - c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Tenaga Pedukung / Paratur Desa
 - d. Badan Usaha di Kabupaten Tanah Laut
 - e. Pekerja Sektor Informal Lainnya
2. Jaminan Sosial Kesehatan yang meliputi :
Pekerja dan Pemberi Kerja sektor Formal dan Informal

c. Nama kegiatan

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut
2. Jaminan Sosial Kesehatan
Sinergi perluasan kepesertaan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

d. Sumber dan jumlah anggaran

-

e. Jangka waktu kerjasama

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

3 (tiga) tahun sejak penandatanganan yaitu terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017

2. Jaminan Sosial Kesehatan

2 (dua) tahun sejak penandatanganan yaitu terhitung sejak tanggal 15 November 2017

f. Hasil (output) dari kerjasama

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Adanya kesepahaman antar instansi untuk mengikutsertakan pekerjajanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui naskah perjanjian atau MoU antar kedua belah pihak (masing-masing instansi dengan BPJS Ketenagakerjaan)

2. Jaminan Sosial Kesehatan

Pemanfaatan sumber daya dan penyinergian fungsi para pihak yang terkait dengan berdasarkan azas saling membantu, saling mendukung agar penyelenggaraan program jaminan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi

B. a. Kerjasama Dengan Bank KalSel, Bank BRI, Baznas, Forum Tala CSR

b. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

c. Bidang Kerjasama

Sosialisasi Permodalan

d. Nama Kegiatan

Pelatihan- Pelatihan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

-

- f. Jangka waktu kerjasama
Tak terbatas
- g. Hasil (output) dari kerjasama
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan Peran Baznas dan Perbankan dalam hal permodalan.
- i. Permasalahan dan Solusi
-

2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

3. Pengelolaan Kawasan Khusus

- a. Jenis Kawasan Khusus :
Kawasan Industri
- b. Status kepemilikan kawasan khusus :
Milik Swasta
- c. Sumber Anggaran :
Swasta (pengelola)
- d. Permasalahan yang dihadapi :
Pihak pengelola belum membangun infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban untuk memperoleh izin IUKI seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 TAHUN 2015 tentang Kawasan Industri.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu bahwa dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 telah memperoleh keberhasilan dalam menciptakan peningkatan keterampilan pencari kerja, penempatan tenaga kerja dan harmonisasi hubungan industrial melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peningkatan kualitas industri kecil dan menengah dan percepatan pembangunan kawasan industri jorong.

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Oleh karena itu penyelenggaraan dimaksud akan selalu bermuara pada pencapaian kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif yang bertumpu pada perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek sebagai akselerasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut.

Bagi terselenggaranya urusan wajib Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut hendaknya memperoleh anggaran yang memadai untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kualitas instruktur / tenaga kepelatihan, tenaga fungsional mediator dan tenaga fungsional pengantar kerja, keadaan ini bertujuan untuk mengurangi peta kerawanan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.

1. Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.

2. Bidang Perindustrian

- a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku industri kecil menengah dengan pembangunan sentra IKM.

b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaan nya.

3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :

1. Penguatan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
2. Penguatan kelembagaan dan personil
3. Membangun jaringan kerja
4. Pemanfaatan teknologi informasi

2. Keberhasilan/ Prestasi/ Penghargaan

a. Prestasi/ Penghargaan yang diraih Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR TINGKAT NASIONAL DI SAMARINDA			
NO	NAMA	BIDANG KOMPETISI	JUARA
1	Hasyim Asy'ari Yusuf, ST	Desain Grafis	HARAPAN I

Tabel 5.1

KEGIATAN KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR REGIONAL KALIMANTAN VII TAHUN 2019 DI SAMARINDA			
NO	NAMA	BIDANG KOMPETISI	JUARA
1	Hasyim Asy'ari Yusuf, ST	Desain Grafis	1
2	Budiman Saputra, ST	Perancangan Rekayasa Mekanik CAD	2
3	Gunawan, A.Md	Otomotif Kendaraan Ringan	2
4	Pauji Rahman, A.Md	Pendingin dan Tata Udara	3

Tabel 5.2

b. Prestasi/ Penghargaan yang diraih Lembaga/ Masyarakat Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PRESTASI/ KEBERHASILAN	NAMA YANG BERPRESTASI	INSTANSI PENYELENGGARA	PERINGKAT DALAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	Penganugerahan PARAMAKARYA	PT. Bandangantirta Agung	Kementerian Ketenagakerjaan	Kategori Perusahaan Menengah Kualifikasi Good Peformance	Penghargaan diserahkan di Istana Wakil Presiden RI

Tabel 5.3

Pelaihari, 27 Januari 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Laut,


MASTURI, S.STP
 NIP. 19770705 199612 1 004

Disnakerind
 Tanah Laut



LAMPIRAN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019										
KABUPATEN : TANAH LAUT										
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN										
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :										
1 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN										
2 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN										
	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan 1	Urusan 2	Urusan 1	Urusan 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Perangkat daerah, sebanyak 1 program	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Perangkat daerah, sebanyak 1 program	100%	100%	Rasionalisasi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Cq Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada 3 yang terdiri dari : 1. Pelayanan Penerbitan Kartu AK/I 2. Penyusunan Lapkin 3. Pengendalian dan pelaporan melalui SI Kijang	Tidak ada	Ada 3 SOP	Tidak ada	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis ; Fotokopi judul SOP, halaman yang ada TTD Grafik SOPnya Apabila lebih dari 5 SOP, dibuat daftar SOP berupa tabel
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1	100%	100%	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 14 - jabatan yang harus ada, sebanyak 14	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100%	100%	DUK dan SOTK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	ada 6 jabatan fungsional : Instruktur Madya, Instruktur Muda, Instruktur Pertama, Instruktur Penyelia, Instruktur Pelaksana Lanjutan, Instruktur Pelaksana	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Ada	tidak ada	Daftar pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah sebanyak 39 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 5099 personil	- PNS Perangkat Daerah sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 5099 personil	0.76%	0.76%	Daftar PNS / DUK
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang sudah mengikuti diklatpim sesuai penjejang, sebanyak 12 org - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org	- Pejabat yang sudah mengikuti diklatpim sesuai penjejang, sebanyak 2 org - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org	86%	50%	Daftar PNS yang sudah mengikuti Diklat PIM dan Daftar Pejabat Struktural

		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 14 org - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt	- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 4 org - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt	100%	100%	Daftar pejabat struktural beserta pangkat dan golongannya
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada, sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari: 1. Renstra 2018 - 2023 2. Renja 2019 3. RKA 2019	Apabila ada, sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari: 1. Renstra 2018 - 2023 2. Renja 2019 3. RKA 2019	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen	Cover Renstra 2018-2023 dan Hal yg ada TTD; Cover Renja 2019 dan halaman yang ada TTD; Cover RKA 2019 dan RKA 2.2
	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 9 program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 5 program	100%	100%	Cover Renja 2019, halaman yang ada TTD kepala SKPD, halaman yang ada program SKPD; Matrik sinkronisasi (sesuai contoh)
	Sinkronisasi Program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 9 program	- Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 5 program	100%	100%	Cover Renja 2019, halaman yang ada TTD kepala SKPD, halaman yang ada program SKPD; Matrik sinkronisasi (sesuai contoh); Cover RKA 2019 dan RKA 2.2
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 program	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 5 program	100%	100%	Matrik sinkronisasi (sesuai contoh); Cover RKA 2019 dan RKA 2.2; Cover DPA 2019 dan DPA 2.2
PENGELAAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 13.352.718.596 - - Total belanja APBD, sebesar Rp. 1.506.091.957.709,50 -	- Total anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 13.352.718.596 - - Total belanja APBD, sebesar Rp. 1.506.091.957.709,50 -	0.89%	0.89%	LRA Perangkat Daerah Tahun 2019
	Besaran belanja modal	14	Belanja terhadap belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat daerah x 100%	- Belanja modal Perangkat Daerah Sebesar Rp. 2.224.267.946.00 - - Total belanja Perangkat daerah sebesar Rp. 10.838.217.237.00	- Belanja modal Perangkat Daerah Sebesar Rp. 2.224.267.946.00 - - Total belanja Perangkat daerah sebesar Rp. 10.838.217.237.00	20.52%	20.52%	LRA Perangkat Daerah Tahun 2019

	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.000.000 - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.116.397.828.00	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.000.000 - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.116.397.828.01	0.48%	0.48%	Belanja pemeliharaan (dari bendahara barang); LRA Perangkat Daerah Tahun 2019
		16	total belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.000.000 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.838.217.237.00	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.000.000 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.838.217.237.00	0.14%	0.14%	Belanja pemeliharaan (dari bendahara barang); LRA Perangkat Daerah Tahun 2019
	Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	ada sebanyak 3 jenis	ada sebanyak 3 jenis	Neraca Tahun 2019; LRA Tahun 2018; Cover Calk dan halaman yang ada TTD Tahun 2019
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Yaitu Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi	Ada, Yaitu Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi	ada	ada	Cover Laporan dan Halaman yang ada TTD Dokumen Sensus BMD Tahun 2019
	Penggunaan asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 342.423.000.00 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 48.929.783.207	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 342.423.000.00 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 48.929.783.207	0.70%	0.70%	1. Daftar Aset yang tidak digunakan (berupa rupiah/harga) 2. KIB Gabungan halaman pertama dan terakhir/ Neraca
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentu fasilitas /prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mas Madia	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	1. Leaflet	Jumlah sebanyak 2 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Cover IKM beserta halaman yang ada nilai IKM SKPD dan halaman yang ada TTD Kepala SKPD

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN :

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	Tenaga Kerja	67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten 112/119 x100%% 94.11%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan 560/165.710 X 100%% 0.34	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja Rp. 10.370.457.000.000 / 165.710	IDR 62,581,962.46	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan 1. LKS : 6/97 X 100% 2. PP : 10/97 X 100%% 6.18% 10.3%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar 89/1733 X 100%% 5.13%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial ----- x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial 7/11 X 100%% 63,63%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi ----- x 100% Jumlah Instruktur 31/79 X 100%% 39%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan ----- x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 13/20 X 100%% 65%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
30	Perindustrian	143	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	$\frac{\text{(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2019 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2018)}}{\text{Jumlah industri besar tahun 2018}} \times 100\%$ $51-50/50 \times 100\%$	<p>.....%</p> <p>2%</p>	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	$1/20 \times 100 \%$	0.05%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $0/3 \times 100\%$	<p>.....%</p> <p>0%</p>	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $0/0 \times 100\%$	<p>.....%</p> <p>0%</p>	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $0/0 \times 100\%$	<p>.....%</p> <p>0%</p>	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Disnakerind Tanah Laut

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH (LPUPD)
TAHUN ANGGARAN 2019